

## **NASIONALISASI NV. NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA TAHUN 1968**

### **NASIONALIZATION NV. NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ AND ITS DEVELOPMENT TILL 1968**

Oleh: Joko Santoso, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta, [santjoe369@gmail.com](mailto:santjoe369@gmail.com)

#### **Abstrak**

Perkembangan Bank Ekspor Impor Indonesia berawal dari didirikannya perusahaan dagang NV. Nederlandsche Handel Maatschappij yang kemudian berubah menjadi lembaga keuangan yang menangani masalah ekspor di wilayah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua lembaga milik Belanda dilikuidasi dan ditutup, termasuk NV. NHM karena dianggap sebagai “bank milik musuh”. Pada masa kemerdekaan, semua lembaga keuangan yang telah dilikuidasi oleh pihak Jepang mulai beroperasi. Pada tahun 1953 dilakukan nasionalisasi pertama terhadap De Javasche Bank dan kemudian dilakukan nasionalisasi lembaga keuangan lainnya, seperti NV. NHM. Setelah dinasionalisasi, NV. NHM berganti nama menjadi Bank Ekspor Impor dan mengalami beberapa kali proses integrasi hingga menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. BEII diberikan tugas untuk mengurus bidang ekspor impor. Struktur kelembagaan dan keorganisasian dari BEII merupakan warisan dari NV. NHM.

*Kata kunci: Nasionalisasi, NV. Nederlandsche Handel Maatschappij, Perkembangan*

#### **Abstract**

*The development of Bank Ekspor Impor Indonesia began with the establishment of the trading company, NV. Nederlandsche Handel Maatschappij which later turned into financial institution handling the export and import in the Dutch East Indies region. During the Japanese occupation, all Dutch-owned institutions were liquidated, including NV. NHM because it was considered as an “enemy’s bank”. During the independence period, all financial institutions which had been liquidated by the Japanese began to operate. In 1953, the first nationalization toward De Javasche Bank was carried out followed by the nationalization of the other financial institutions, such as NV. NHM. After being nationalized, NV. NHM was changed into Bank Ekspor Impor and underwent several integration processes to become Bank Ekspor Impor Indonesia. BEII. BEII is given the task for managing the export import sector. The institutional and the organizational structure of the bank is inherited from NV. NHM. The organizational structure of the bank is; led by the President Director and supervised by the Supervisory Board, and there are several levels of position to carry out the activities in Bank Ekspor Impor Indonesia.*

*Keyword: Nationalization, NV. Nederlandsche Handel Maatschappij, Development*

## PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi suatu negara. Kegiatan perdagangan tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara saja, namun suatu negara juga melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain melalui kegiatan ekspor impor. Di Indonesia sendiri, kegiatan ekspor impor telah dilakukan sejak berabad-abad silam. Perkembangan ekspor impor di Indonesia mulai mengalami kemajuan saat Indonesia berada di bawah kekuasaan VOC. Setelah VOC dibubarkan, Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Pada saat pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah melakukan perluasan perkebunan swasta dan perubahan mendasar dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembang pesatnya pelabuhan-pelabuhan, terutama di Pulau Jawa, sebagai pintu keluar masuk produk ekspor.<sup>1</sup> Peningkatan aktivitas ekspor ini semakin meningkat secara intensif

setelah komoditi-komoditi ekspor milik Pemerintah Hindia Belanda mulai ditangani oleh NV. *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NV. NHM).<sup>2</sup> NV. NHM sendiri merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja Williem I pada tahun 1824. Perusahaan dagang ini didirikan memang untuk mengontrol dan melindungi semua aktivitas ekonomi Belanda di Indonesia. Hal ini dikarenakan keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga Belanda memusatkan ataupun mengonsentrasikan aktivitasnya di wilayah Hindia-Belanda.

Pada masa *Cultuurstelsel* atau masa tanam paksa, NV. NHM diberikan kepercayaan untuk menangani masalah di bidang pengeksportan barang-barang milik pemerintah, seperti produk-produk hasil perkebunan dari tanam paksa untuk dikirim ke negeri induknya, yaitu Belanda.<sup>3</sup> Kemudian untuk memperluas jaringan usaha dari NV. NHM sendiri, pada tahun 1826 perwakilan NV. NHM yang berada di Batavia membuka kantor cabang di beberapa tempat. Perluasan

---

<sup>1</sup> Djoko Suryo, "Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in The Later 19<sup>th</sup> Century", *Disertasi*, (Clayton: Monash University, 1982), hlm. 184.

<sup>2</sup> Wasino, dkk, *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN: Dari*

*Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, (Biro Hukum Kementerian BUMN Republik Indonesia, 2013), hlm. 93.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

jaringan usaha ini bermaksud untuk memonopoli pengangkutan barang-barang pemerintah. Setelah *Cultuurstelsel* atau tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870, NV. NHM mulai mengalami kemunduran. Hal ini menyebabkan penyempitan bidang usaha yang dilakukan oleh NV. NHM, yaitu memfokuskan bidang usaha perbankan modern.<sup>4</sup> Pada masa tersebut juga mulai diberlakukan UU Agraria sehingga mulai berdatangan modal-Modal asing dan muncul perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan asing tersebut leluasa beroperasi hingga masa kependudukan Jepang.

Pada masa kependudukan Jepang, kebijakan ekonomi Jepang diarahkan untuk mendukung Jepang dalam peperangan Asia-Pasifik. Secara umum, kebijakan pada masa kependudukan Jepang diarahkan untuk menjadi sentralistik. Berbeda dengan masa Hindia-Belanda yang memberikan keleluasaan untuk penanam modal untuk mendirikan perusahaan swasta. Pada masa pendudukan Jepang, semua sektor usaha diambil alih oleh pihak Jepang. Di bidang perbankan sendiri, kegiatan semua bank secara resmi dibekukan oleh

pihak Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Kemudian sebulan setelahnya pihak Jepang mengeluarkan kebijakan likuidasi dalam bentuk memorandum dan berlaku untuk semua bank yang dianggap sebagai bank milik musuh termasuk bank milik Inggris dan China.<sup>5</sup>

Pada masa revolusi kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai masalah. Masalah yang paling menyita perhatian dari Republik, yaitu ancaman kembalinya kekuatan kolonialisme Belanda. Masalah politik lainnya yang menyita perhatian adalah masalah keutuhan Republik yang diakibatkan oleh pembentukan Negara boneka yang dibuat oleh van Mook. Keadaan ini terjadi hingga tahun 1949 setelah Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dan pada tahun berikutnya Indonesia mulai memulihkan integritas Indonesia.<sup>6</sup> Pada masa pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Mohammad Natsir, mengumumkan mulai dilaksanakan RUP atau Rencana Urgensi Perekonomian. Rencana ini bertujuan untuk membimbing berbagai kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi. Rencana ini dilaksanakan untuk menciptakan pengusaha-pengusaha kelas menengah

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 256-258.

<sup>6</sup> R.Z. Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 85-86.

yang tangguh.<sup>7</sup> Rencana ini diharapkan mampu untuk mewujudkan ekonomi nasional secara cepat.

Rencana tersebut pada akhirnya mengalami banyak masalah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kendala lain untuk mewujudkan ekonomi nasional yang cepat adalah gagalnya pemerintah dalam penanganan dominasi pengusaha asing. Hingga akhir tahun 1957, sektor ekonomi modern Indonesia masih dikuasai oleh modal asing. Salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan nasionalisasi<sup>8</sup> terhadap perusahaan milik asing. Namun, dalam pelaksanaan tersebut diperlukan suatu alasan yang kuat untuk dapat menjadi dasar legitimasi.<sup>9</sup>

Nasionalisasi pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah *De Javasche Bank* yang merupakan bank hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar yang ditugasi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, dengan membeli saham-saham perusahaan dan mengubah namanya menjadi Bank

Indonesia. Pada awalnya, pengambilalihan ini dilakukan oleh serikat-serikat buruh dengan menduduki perusahaan-perusahaan milik Belanda. Namun, pengambilalihan tersebut kemudian dilarang karena menyebabkan kerusakan sehingga pengambilalihan dilakukan oleh penguasa militer untuk menjaga kepentingan keamanan.

Pengambilalihan terhadap bank-bank pun juga dilakukan oleh serikat buruh, namun dapat digagalkan oleh Bank Indonesia karena ditakutkan akan terjadi kekacauan seperti pengambilalihan sebelumnya. Pada tanggal 8 Desember 1957, dibentuk sebuah badan pengawasan yang bernama Badan Pengawas Bank yang diketuai oleh Staff Harian Penguasa Militer yang mengawasi penguasa-penguasa bank Belanda.<sup>10</sup> Pengambilalihan oleh para buruh ini terjadi hingga pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur jalannya pengambilalihan oleh pemerintah yang disebut dengan Nasionalisasi. Pada tanggal 3 Desember 1958 disetujui

---

<sup>7</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 11.

<sup>8</sup> Nasionalisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa atau Negara, terutama milik asing. Lihat

Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 974.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

pemberlakuan Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.<sup>11</sup> Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain; pengumpulan data (Heuristik), kritik

sumber (Verifikasi), penafsiran (Intepretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).<sup>13</sup>

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data

atau materi sejarah. Tahap kedua kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap ketiga interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapan ini sering dijadikan pemicu subjektifitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis, ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. NV. *Nederlandsche Handel Maatscappaj* Sebelum Nasionalisasi

Perkembangan lembaga perbankan di Indonesia telah dimulai sejak masa Pemerintahan Kolonial.

<sup>11</sup> Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

<sup>12</sup> Nugroho Notokusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

<sup>13</sup> Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

Lembaga perbankan mulai didirikan karena desakan dari kalangan pengusaha Belanda untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Hal ini dikarenakan barang-barang hasil industri dari Belanda agar bisa diekspor ke Hindia Belanda memerlukan alat pembayaran luar negeri.<sup>14</sup> *NV. Nederlandsche Handel Maatschappij* merupakan salah satu perusahaan dagang ekspor impor yang didirikan oleh Raja William I pada tahun 1824.<sup>15</sup> Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mengembalikan perekonomian Belanda yang mengalami kebangkrutan pasca perang Belgia. Hal lain yang melatarbelakangi pendiriannya adalah tidak mampunya VOC dalam mengembangkan usahanya yang bangkrut di Hindia Belanda.<sup>16</sup> Hal ini menyebabkan pada tahun 1826, *NV. Nederlandsche Handel Maatschappij* mendirikan cabang di Hindia Belanda. Perusahaan ini melakukan usahanya

bersama dengan *De Javasche Bank* dengan memberikan kredit berupa uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah.<sup>17</sup>

Pada awal dekade abad ke-20, pemerintah kolonial masih memberikan perhatian pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Politik Etis.<sup>18</sup> Kebijakan ini merupakan satu kebijakan kesejahteraan yang merupakan hasil desakan dan tekanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelaksanaan kebijakan itu ditujukan untuk peningkatan di sektor ekonomi seperti pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian kredit.

Setelah penyerahan kekuasaan tanpa syarat oleh pemerintahan kolonial kepada pihak Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka berakhirilah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dan mulainya kekuasaan pendudukan Jepang. Pada awal kekuasaannya, pemerintah

---

<sup>14</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 122.

<sup>15</sup> Artikel *Nederlandsche Handel Maatschappij*, 1824-1964, diakses dari [www.abnamro.com/en/images/Documents/010\\_About\\_ABN\\_AMRO/History/NHM\\_\(UK\).pdf](http://www.abnamro.com/en/images/Documents/010_About_ABN_AMRO/History/NHM_(UK).pdf) pada tanggal 18 April 2018 pada pukul 04.00 WIB.

<sup>16</sup> Dinna Safitri, "Nasionalisasi *Nederlandsche Handel Maatschappij*

1957-1960", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.

<sup>17</sup> Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan Edisi I*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonom UGM, 1980), hlm. 226.

<sup>18</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 228.

pendudukan Jepang memerintahkan untuk menghentikan semua kegiatan lembaga perbankan. Perintah penghentian itu dikeluarkan oleh administrasi pendudukan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Satu bulan berikutnya atau tepatnya pada tanggal 11 April 1942, penguasa militer Jepang mengeluarkan kebijakan likuidasi yang berlaku untuk semua bank yang dianggap sebagai bank milik musuh dan semua bank lokal yang beroperasi di Hindia Belanda.<sup>19</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil mewujudkan cita-cita menjadi bangsa dan negara yang merdeka setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Ancaman yang paling menyita perhatian adalah kembalinya Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia dan masalah ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi kesulitan ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk membangun ekonomi nasional adalah pemerintah membuat program pinjaman nasional, penggunaan ORI, mendirikan Bank Negara Indonesia 1946, pembentukan

*Plannin Board* (Badan Perencanaan Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang pada tahun 1948, dan rencana Kasimo.

### **B. Proses Nasionalisasi NV. *Nederlandsche Handel Maatschappij* Pada Tahun 1960**

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda khususnya NHM memiliki latar belakang politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1950 hingga tahun 1957 mempunyai pengaruh sangat penting terhadap munculnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan pada tahun 1950 hingga tahun 1959, Indonesia sedang berusaha untuk membangun sistem perekonomiannya dengan memberikan kesempatan pada pengusaha nasional untuk ikut dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, kegiatan sektor ekonomi di Indonesia masih dikuasai oleh pengusaha asing, sehingga membuat pengusaha nasional tidak bisa bersaing dengan pengusaha asing.

<sup>19</sup> Wasino, dkk, *op. cit.*, hlm. 256.

<sup>20</sup> Dinna Safitri, *op. cit.*, hlm. 20.

Kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Indonesia diawali pada tahun 1953. Pada tahun 1953, nasionalisasi pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah menasionalisasi *De Javasche Bank* yang kemudian diganti dengan Bank Indonesia. Nasionalisasi *De Javasche Bank* ini sangat penting dalam proses nasionalisasi NHM karena *De Javasche Bank* merupakan bank yang mengusulkan atau menetapkan kebijakan untuk lembaga keuangan lainnya. Hal ini menyebabkan NHM berada di bawah arahan atau pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan dalam mengusulkan agar proses nasionalisasi NHM dilakukan dengan cara-cara yang lebih terarah sehingga tidak menimbulkan kerugian.<sup>21</sup>

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya RUU tersebut diterima oleh Dewan Kementerian pada tanggal 31 Oktober 1958 dan disampaikan kepada DPR dengan amanat presiden tanggal 12 Desember 1958 No. 6066/HK/58, kemudian disetujui oleh DPR dalam rapatnya yang ke-191

tanggal 3 Desember 1958. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958 (LN 1958 No. 38)<sup>22</sup> tentang penetapan semua bank Belanda di bawah penguasaan Pemerintah RI dan pembentukan Badan pengawas Bank-Bank Belanda.<sup>23</sup> Setelah dikeluarkan UU tersebut, pemerintah berangsur-angsur melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Ketentuan dalam melaksanakan nasionalisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959.<sup>24</sup>

Bank Belanda pertama kali yang dinasionalisasi oleh pemerintah adalah *Nationale Handelsbank* (NHB). Bank kedua yang dinasionalisasi adalah *Escompto Bank*. Bank ini berhasil dinasionalisasi pada tahun 1960 setelah mengalami proses yang agak rumit. Kemudian bank yang ketiga yang dinasionalisasi adalah *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Meskipun peraturan pemerintah tentang Nasionalisasi NHM dikeluarkan pada tahun 1960, namun nasionalisasi NHM

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>22</sup> Lembar Negara Republik Indonesia No. 38 Tahun 1958, Jawa

Timur: BPAD, hlm. 106.

<sup>23</sup> Wasino, dkk, *op. cit.*, hlm. 438-440.

<sup>24</sup> Lembar Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1959, Jawa Timur: BPAD, hlm. 101-103.

sudah sejak tahun 1957, hanya secara formal nasionalisasi baru dilakukan pada tahun 1960.<sup>25</sup>

Pendirian Bank Ekspor Impor Indonesia tidak akan lepas dari pendirian Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Hal ini karena sebelum menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia, bank ini diintegrasikan ke dalam BKTN. Pembentukan BKTN ini berdasarkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 41 Tahun 1960. Tujuan pembentukan bank ini adalah tersedianya fasilitas kredit yang ditujukan untuk usaha-usaha koperasi ke arah perwujudan perekonomian rakyat dengan asas kekeluargaan.<sup>26</sup>

BKTN dalam menjalankan usahanya diberikan modal awal sebesar Rp. 500 juta dan dapat ditambah dengan ketentuan undang-undang.<sup>27</sup> Setelah NHM dinasionalisasi pada tahun 1960 oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat dan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 263206/BUM II tanggal 30 November 1960, segala hak,

kekuasaan, kekayaan, perlengkapan, kewajiban, dan utang-utang NHM diserahkan kepada BKTN.

Peleburan NHM ke dalam BKTN urusan ekspor impor terhitung sejak tanggal 5 Desember 1960. Semenjak tanggal tersebut segala urusan hak dan kewajiban, asset dan seluruh pegawainya diserahkan kepada BKTN termasuk anggota-anggota Badan Pimpinan Pusat NHM NV Indonesia diperbantukan kepada Direksi BKTN.<sup>28</sup> Proses pengintegrasian NHM ke dalam BKTN ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pada tahap awal integrasi, eks NHM menjalankan pekerjaannya sebagai bagian dari BKTN urusan ekspor impor. Seluruh pengintegrasian eks NHM berjalan selama 2 tahun dari 1962 hingga 1964, dan setelah selesai, sebutan BKTN urusan ekspor impor ditiadakan.<sup>29</sup>

BKTN berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965 BNI Unit II dalam kegiatan dibagi menjadi dua tugas, yaitu BNI Unit II bidang Rural yang dijalankan oleh ex peleburan BRI dan ex

<sup>25</sup> Dinna Safitri, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>26</sup> Tedy Hendarto, "Dinamika Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) Tahun 1968-1972", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 44.

<sup>27</sup> J. Soedradjad Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode II:*

*1959-1966*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 148.

<sup>28</sup> Roechyana Djaja, *Sejarah Lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia*, (Jakarta: Bank Exim, 1993), hlm. 20.

<sup>29</sup> J. Soedradjad Djiwandono, dkk., *op. cit.*, hlm. 149.

Bank Tani dan Nelayan dan BNI Unit II bidang Exim yang dijalankan oleh ex NHM. Perkembangan bank BNI Unit II sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor bank ini. Pada akhir tahun 1960, jumlah kantor bank BNI Unit II yang masih bernama BKTN ini berjumlah 135 kantor di seluruh wilayah Indonesia, kemudian bertambah pada akhir tahun 1965 berjumlah 210 kantor di seluruh wilayah Indonesia.<sup>30</sup>

Perkembangan selanjutnya, Bank Exim mulai membuka kantor-kantor cabang di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1972, kantor cabang yang telah dibuka oleh Bank Exim berjumlah 34 kantor cabang<sup>31</sup> dan 2 kantor perwakilan di New York, Amerika Serikat dan Amsterdam, Belanda. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 13/1968 tentang Bank Sentral, kegiatan operasional dari Bank Exim menjadi semakin kuat karena UU ini menjadi landasan pokok yang baru untuk mengarah pada sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini membuat Bank Exim dapat mengembangkan usahanya melalui pembukaan berbagai kantor cabang dekat dengan sektor produksi, seperti daerah

perkebunan dan pertambangan yang ada di Indonesia.

### **C. Bank Ekspor Impor Indonesia Pasca Nasionalisasi**

Pasca nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda termasuk lembaga perbankan pada tahun 1960, NHM yang merupakan lembaga perbankan milik Belanda resmi menjadi milik Indonesia. Pada tahun 1968, Bank Ekspor Impor didirikan oleh pemerintah untuk menggantikan posisi NHM dalam memberikan pembiayaan dan layanan jasa dalam bidang ekspor impor. Selama tahun 1960 hingga tahun 1968, Bank Exim mengalami beberapa kali proses pengintegrasian yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya, Bank exim kemudian menjadi salah satu bank yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Exim dalam bidang perkebunan, perdagangan, dan industri hasil hutan, sehingga pada tahun 1968 hingga tahun 1972 jumlah aktiva dan pasiva yang dihasilkan oleh Bank Exim mengalami peningkatan dibanding tahun

---

<sup>30</sup> J. Soedradjad Djiwandono, dkk., *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>31</sup> Soetatwo Hadiwigedo dan Faried Wijaya, *op. cit.*, hlm. 341.

sebelumnya. Jumlah aktiva dan passiva yang dimiliki oleh Bank Ekspor Impor terus meningkat hingga tahun 1980an.

Melalui program-program pemerintah yang dijalankan oleh lembaga perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian negara. Meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut dapat dilihat dengan jumlah kredit perbankan yang mulai meningkat. Jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan lebih dari 80 persen jumlah kredit yang diberikan merupakan jenis kredit jangka pendek dan sisanya merupakan kredit jangka panjang atau kredit investasi. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan atau disalurkan ke sektor ekspor, produksi, penyediaan pangan, perdagangan dalam negeri, impor, dan lain-lain.<sup>32</sup> Pada tahun 1970, pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengalami sedikit perubahan dalam skala prioritas pemberian kredit. Pada tahun-tahun sebelumnya, prioritas utama yang diberikan kredit yaitu sektor penyediaan pangan, namun kemudian prioritas utama yang diberikan kredit

diubah ke bidang sektor produksi kemudian sektor ekspor menyusul penyediaan pangan dan lain-lain.

Pada tahun 1972, Bank Ekspor Impor Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut dilihat dari jumlah neraca yang mengalami peningkatan sebesar 58 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah neraca tersebut berasal dari peningkatan dana-dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Sebagian besar dana tersebut merupakan penghimpunan dari masyarakat yang berasal dari program Tabanas dan Taska.<sup>33</sup> Sejalan dengan peningkatan dana yang cukup signifikan, Bank Ekspor Impor Indonesia juga meningkatkan jumlah pemberian kredit kepada nasabahnya.

Struktur organisasi dari Bank Exim terdiri dari seorang Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh pemerintah atas usul Menteri Keuangan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya habis.<sup>34</sup> Direksi Bank memiliki tugas dan

---

<sup>32</sup> Tedy Hendarto, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>34</sup> Undang-Undang RI No. 22 tahun 1968 tentang Pendirian Bank Ekspor Impor Indonesia, BAB V Pasal 8.

kewajiban untuk menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengurus Bank dan direksi bertanggungjawab kepada pemerintah.<sup>35</sup>

Pada tahun 1972, struktur organisasi pada cabang utama dikelompokkan menjadi beberapa cabang kelas. Selain melakukan pengelompokan pada cabang-cabang, Bank Exim juga melakukan pengembangan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan baru. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Exim dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya antara lain dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang akan meningkatkan kesejahteraan serta adanya jaminan masa depan.<sup>36</sup> Proses pelatihan dan pendidikan sumber daya yang dimiliki oleh Bank Exim, yaitu mengirim tenaga-tenaga muda yang mempunyai bakat untuk belajar di negeri Belanda. Tenaga-tenaga muda yang akan dikirim ke Amsterdam Belanda untuk belajar sebelumnya diseleksi melalui proses wawancara dan ujian. Semua

biaya perjalanan dan pendidikan ditanggung oleh pemerintah.<sup>37</sup>

Pada periode tahun 1979 sampai tahun 1980, pengeluaran devisa untuk impor bukan minyak mengalami kenaikan sebesar US \$ 1.246 juta daripada periode tahun sebelumnya. Pengeluaran devisa untuk impor minyak mengalami kenaikan sebesar US \$ 689 juta dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya industri LNG (*Liquefied Natural Gas*), sehingga barang-barang modal untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut juga mengalami kenaikan yang cukup besar.<sup>38</sup>

Realisasi impor untuk barang-barang konsumsi secara keseluruhan mengalami penurunan, kecuali beras. Realisasi impor beras mengalami kenaikan sebesar 37,8 persen atau US \$ 71,8 Juta. Realisasi impor untuk bahan baku atau penolong pada periode 1979/1980 mengalami penurunan sebesar 20,6 persen daripada periode tahun sebelumnya, namun di dalam

---

<sup>35</sup> Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Bank Ekspor Impor Indonesia, BAB V Pasal 9.

<sup>36</sup> Tedy Hendarto, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>37</sup> Roechyana Djaja, *op. cit.*, (Jakarta: Bank Exim, 1993), hlm. 25.

<sup>38</sup> Tim Penulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1980/1981*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1981), hlm. 80.

kelompok barang ini bahan-bahan kimia serta hasil preparat mengalami peningkatan. Berbeda dengan kedua golongan sebelumnya, realisasi nilai impor barang-barang modal dalam periode 1979/1980 mengalami peningkatan sebesar US \$ 34,4 Juta daripada tahun sebelumnya.<sup>39</sup>

### KESIMPULAN

Perkembangan dan kondisi Bank Ekspor Impor Indonesia berawal dari didirikannya perusahaan dagang yang bernama *NV. Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824 dan dibukanya kantor cabang di wilayah Hindia Belanda. Sebelum tahun 1870, NV. NHM memiliki bidang usaha perusahaan dagang dan lembaga perbankan. Pasca tahun 1870, NV. NHM secara resmi dipersempit menjadi lembaga perbankan dan sebagai perusahaan yang menjadi sumber utama pembiayaan semua perkebunan yang berada di wilayah Hindia Belanda bersama dengan *De Javasche Bank*. Hal ini disebabkan oleh berubahnya sistem perekonomian di wilayah Hindia Belanda yang menyebabkan banyak perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya.

Keadaan tersebut berlangsung hingga masuknya pendudukan Jepang ke wilayah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, sistem perekonomiannya diubah dan ditujukan untuk kebutuhan militer. Salah satu perubahan ekonomi yang dilakukan Jepang ialah dengan dengan melikuidasi seluruh bank, salah satunya adalah NV. NHM. Setelah melikuidasi bank-bank yang dianggap sebagai milik musuh, pihak Pemerintah Jepang mendirikan bank-bank milik Jepang sendiri. Pasca pihak Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan semua perusahaan perbankan yang telah dilikuidasi oleh pihak Jepang kembali dibuka. Pada tahun 1950-an, mulai muncul pemikiran untuk menasioanlisasi perusahaan milik Belanda karena ada anggapan mengenai dominasi modal asing sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi nasional.

Tahun 1953, Pemerintah RI melakukan nasionalisasi pertama terhadap *De Javasche Bank* dan dilanjutkan dengan nasionalisasi-nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda yang lainnya. Setelah dilakukan nasionalisasi, NV. NHM diintegrasikan ke dalam BKTN dengan tujuan untuk

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 81.

mengembangkan usaha mereka ke arah kegiatan yang berorientasi ekspor. Tahun 1965, Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem perbankan yang dikenal dengan sistem Bank Tunggal. BKTN mulai diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia Unit II pada tahun 1965, kemudian BNI Unit II dibagi menjadi dua bidang, Rural dan Ekspor Impor. Tahun 1967, BNI unit II bidang Ekspor Impor digantikan oleh Bank Ekspor Impor.

Pasca pendirian Bank Ekspor Impor pada tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi salah satu bank yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu dengan diberikan tugas untuk mengurus bidang ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia. Selama tahun 1968 hingga tahun 1980, ekspor impor Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekspor dan impor di sektor minyak bumi. Berbanding terbalik dengan sektor non minyak yang mengalami perkembangan yang sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sering berganti untuk menyesuaikan dengan keadaan harga penawaran dunia.

Keadaan kelembagaan Bank Ekspor Impor Indonesia setelah nasionalisasi pada dasarnya merupakan pewarisan dari NV. NHM, termasuk kelembagaan dan

struktur keorganisasiannya. Dalam struktur keorganisasiannya, Bank Ekspor Impor Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur utama dan beberapa orang direktur. Pihak direksi tersebut diawasi oleh dewan pengawas yang diangkat langsung oleh presiden dengan usul dari Menteri Keuangan. Selain dua jabatan tersebut, ada pula jabatan pegawai untuk menjalankan aktivitas Bank Ekspor Impor Indonesia. Jabatan pegawai terdapat beberapa jenjang kepangkatan yang memiliki tugas berbeda-beda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia*, Jakarta: Sinar harapan, 2001.
- Dinna Safitri, "Nasionalisasi *Nederlandsche Handels Maatschappij* 1957-1960", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Djoko Suryo, "Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in The Later 19<sup>th</sup> Century", *Disertasi*, Clayton: Monash University, 1982.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, 1996.
- J. Soedradjad Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.

M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* Jakarta: Mega Book Store, 1984.

R.Z. Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Roechyana Djaja, *Sejarah Lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia*, (akarta: Bank Exim, 1993.

Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan Teori dan Kebijakan Edisi I*, Yogyakarta: Fakultas Ekonom UGM, 1980.

Tedy Hendarto, "Dinamika Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) Tahun 1968-1972", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Tim Penulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1980/1981*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1981.

Undang-Undang RI No. 22 tahun 1968 tentang Pendirian Bank Ekspor Impor Indonesia, BAB V Pasal 8.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Bank Ekspor Impor Indonesia, BAB V Pasal 9.

Wasino, dkk, *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, Jakarta: Biro Hukum Kementerian BUMN Republik Indonesia, 2013.